

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GIANYAR DI ERA REFORMASI

I Made Artayasa¹, Ni Wayan Anggreni², Ni Luh Putu Suastini³

¹Universitas Ngurah Rai Denpasar, Indonesia

²Akademi Pariwisata Denpasar, Indonesia

³Universitas Ngurah Rai Denpasar, Indonesia

Email: ¹made.artayasa@unr.ac, ²anggreni.28j@gmail.com, ³putu.suastini@unr.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3683>

Received: 1 February 2024

Revised: 23 April 2024

Accepted: 14 May 2024

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah adalah inti dari demokrasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Gianyar di era reformasi adalah ikut serta dalam pemilihan dengan datang ke TPS. Partisipasi masyarakat yang datang ke TPS dalam tiga kali pemilihan yaitu pemilihan kepala daerah tahun 2008, 2012, dan 2018 terus mengalami penurunan, meskipun rata-rata masih di atas 80%. Bentuk partisipasi masyarakat selain ikut melakukan pilihan di TPS adalah sebagai tim pemenangan, relawan, ikut berkampanye serta ikut memberikan dana atau barang kepada calon kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena ingin mengeksplor bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Gianyar di era reformasi. Kabupaten Gianyar dengan wilayahnya membentang dari utara ke selatan, partisipasi masyarakatnya mengalami perbedaan. Gianyar utara dengan nuansa pedesaan partisipasi masyarakatnya cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat Gianyar selatan dengan nuansa perkotaan. Tingginya partisipasi masyarakat utara karena adanya kolaborasi pengurus partai politik pengusung calon kepala daerah dengan tokoh masyarakat khususnya tokoh adat. Sedangkan masyarakat Gianyar selatan, karena tidak ada intervensi dari siapapun mereka secara bebas menggunakan hak pilihnya. Keadatangannya cukup kecil datang ke TPS karena alasan pekerjaan, ada juga karena kurang peduli dengan lingkungan.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pemilihan kepala daerah, reformasi

Abstract

Community participation in the election of regional heads is the essence of democracy. One form of community participation in the election of the regional head of the Gianyar regency in the reform era is to participate by coming to the polling station (TPS). The community's participation in the TPS in the three elections, namely the regional head elections in 2008, 2012, and 2018, continues to decline, although the average is still above 80%. Forms of community participation other than voting at the TPS include being part of campaign teams, volunteering, campaigning, and contributing funds or goods to the regional head candidates. This study uses a qualitative method to explore how community participation in the election of the regional head of the Gianyar regency in the reform era. Gianyar regency, with its territory stretching from north to south, experiences differences in community participation. Northern Gianyar, with its rural atmosphere, has higher community participation compared to southern Gianyar, with its urban atmosphere. The high participation of the northern Gianyar community is due to the collaboration between the management of political parties supporting regional head candidates and community leaders, especially traditional leaders. Meanwhile, without any intervention from anyone, the southern Gianyar community freely exercises their voting rights. Their turnout at the TPS is relatively low due to reasons such as work commitments, and some also due to a lack of concern for the environment.

Keywords: community participation, regional head election, reform

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat pada negara yang menganut sistem demokrasi diwujudkan dalam keikutsertaannya pada berbagai tahapan pemilihan umum, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pada pemilihan kepala daerah. Tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan pernah ada pemerintahan yang demokratis. Verba, Schlozman, dan Brady yang dikutip Mujani (2011:76), berpendapat bahwa “partisipasi warga negara adalah jantung demokrasi”. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap aktifitas politik sesuai dengan yang dikatakan Budiardjo (2015:367), partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. Partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS melakukan pemilihan langsung kepala daerah sangat menentukan terpilihnya atau tidak terpilihnya pasangan calon, sehingga partisipasi masyarakat menjadi intisari demokrasi.

Pemilihan langsung kepala daerah di era reformasi telah melalui proses yang cukup panjang, berbeda dengan format pemilihan kepala daerah pada masa

berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, pemerintah pusat mempunyai peran yang sangat dominan menentukan calon yang bisa terpilih dan DPRD hanya melegitimasi. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pemilihan dilakukan oleh DPRD, sehingga anggota DPRD mempunyai peran yang sangat penting dari awal proses perekrutan sampai terpilihnya calon kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dengan dominasi pemerintah pusat dan oleh DPRD telah menghambat proses demokrasi sehingga terjadi adanya kepala daerah yang terpilih belum sesuai dengan keinginan masyarakatnya.

Pemilihan kepala daerah langsung diawali dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2005. Untuk mengimplementasikan kebijakan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Gianyar baru bisa dilaksanakan tahun 2008.

Kabupaten Gianyar salah satu kabupaten di Provinsi Bali dengan julukan sebagai kota seni terbagi menjadi tujuh (7) kecamatan, enam puluh empat (64) desa dan enam (6) kelurahan, telah melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah mulai tahun 2008, 2012, dan 2018. Adapun hasil dari pemilihan langsung kepala daerah di era reformasi itu sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel .1

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Era Reformasi di Kabupaten Gianyar

No	Kecamatan	2008		
		Jumlah Pemilih	Pengguna hak pilih	Persentase
1	Gianyar	63.484	51.832	82%
2	Blahbatuh	47.437	38.619	81%
3	Tampaksiring	33.612	30.360	90%
4	Sukawati	66.362	50.649	84%
5	Ubud	46.383	42.116	91%
6	Payangan	31.665	32.284	86%
7	Tegallalang	35.430	26.616	93%
Jumlah		324.373	279.081	86%

Sumber: diolah dari data KPUD kabupaten Gianyar

Tabel .2
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Era Reformasi di Kabupaten Gianyar Tahun 2012

No	Kecamatan	2012		
		Jumlah Pemilih	Pengguna hak pilih	Persentase
1	Gianyar	69.191	54.713	79%
2	Blahbatuh	51.710	39.103	76%
3	Tampaksiring	36.087	31.114	85%
4	Sukawati	70.851	54.267	86%
5	Ubud	50.376	42.584	84%
6	Payangan	33.964	29.181	86%
7	Tegallalang	37.471	34.160	91%
Jumlah		349.600	285.122	82%

Sumber: diolah dari data KPUD Kabupaten Gianyar

Tabel .3
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Era Reformasi di Kabupaten Gianyar Tahun 2018

No	Kecamatan	2018		
		Jumlah pemilih	Pengguna hak pilih	Persentase
1	Gianyar	71.860	55.189	76.8%
2	Blahbatuh	52.812	41.463	78.9%
3	Tampaksiring	38.115	32.094	84.2%
4	Sukawati	75.844	62.382	82.3%
5	Ubud	52.628	44.945	85.4%
6	Payangan	35.919	30.377	84.6%
7	Tegallalang	39.434	33.391	85.4%
Jumlah		366.612	300.210	81.8%

Sumber: diolah dari data KPUD kabupaten Gianyar

Rekapitulasi partisipasi masyarakat tersebut di atas menunjukkan partisipasi

masyarakat di semua kecamatan mengalami penurunan dalam setiap periode pemilihan kepala daerah. Kecamatan Gianyar sebagai pusat kabupaten dan kecamatan Blahbatuh partisipasi masyarakatnya untuk ikut memilih lebih kecil di bandingkan dengan lima kecamatan lainnya, sedangkan kecamatan Tegallalang partisipasi masyarakatnya paling tinggi. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Gianyar di era reformasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Gianyar di era reformasi ini sesuai dengan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena pemilihan kepala daerah di kabupaten Gianyar yaitu tahun, 2008, 2012 dan 2018. Pengumpulan data awal melalui observasi di lanjutkan dengan melakukan wawancara dengan informan secara mendalam. Informan ditentukan secara *purposive sampling* yaitu karena pengetahuannya tentang partisipasi politik. Data juga didapatkan melalui dokumen dari KPUD Gianyar dan lembaga lain, serta data juga dikumpulkan secara *online*. Informan dalam penelitian ini antara lain: tokoh-tokoh masyarakat, *Bendesa Adat*, tokoh puri dan elit politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat dalam setiap lapisannya memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik suatu bangsa atau

suatu wilayah tertentu. Menurut Edward Shils yang dikutip Sztompka (2014:65) masyarakat adalah fenomena antar waktu. Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu. Tetapi ia hanya ada melalui waktu. Ia adalah jelmaan waktu. Soekanto (1982:136) mengatakan dalam masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan *rural community* dan *urban community*. Warga pedesaan, suatu masyarakat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lain. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Masyarakat perkotaan atau *urban community* adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Sedangkan Ibnu Khaldun yang dikutip Martono (2014:37) membedakan dua jenis kelompok sosial yang keduanya memiliki karakter yang cukup berbeda. Pertama “*badawah*”, yaitu masyarakat yang tinggal di pedalaman, masyarakat primitif atau tinggal di daerah gurun. Khaldun menyebut kelompok ini dengan istilah masyarakat *badui*. Masyarakatnya hidup lebih sederhana, memiliki tingkat ketakwaan yang lebih baik, memiliki ikatan solidaritas yang kuat. Solidaritas sosial dengan istilah “*ashabiyah*” menjadi syarat kekuasaan dan kemudian solidaritas sosial inilah yang menyatukan tujuan, mempertahankan diri, dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Kedua, “*hadharah*” yaitu masyarakat yang identik dengan kehidupan kota. Masyarakat kota lebih banyak berurusan dengan kehidupan yang enak, mewah, dan mengikuti hawa nafsu. Kehidupan mereka bersifat lebih individualis yang berdampak pada lemahnya ikatan solidaritas mereka.

Soekanto (1982:132) mengatakan, perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, pada hakikatnya

bersifat gradual. Agak sulit untuk memberikan batasan apa yang dimaksudkan dengan perkotaan karena adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang di namakan urbanisme. Di era globalisasi dan informasi dewasa ini perbedaan kota dan desa tidak setajam pada era sebelumnya yang di sebabkan oleh perkembangan teknologi, informasi dan transportasi. Melihat pengelompokan masyarakat oleh para ahli tersebut, kabupaten Gianyar secara geografis merupakan kabupaten yang membentang dari utara ke selatan, ujung utara mendekati pegunungan dan ujung selatan adalah pesisir pantai. Sehingga dalam penelitian ini wilayah kabupaten Gianyar dapat di bagi menjadi dua kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat Gianyar Utara dan kelompok masyarakat Gianyar Selatan. Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Gianyar Utara partisipasinya untuk datang ke TPS dalam memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah lebih tinggi di bandingkan dengan masyarakat Gianyar Selatan. Selain datang ke TPS memberikan suaranya, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Gianyar adalah sebagai tim pemenang, sebagai relawan, ikut dalam kampanye serta ikut memberikan dana kepada calon kepala daerah dalam berkampanye.

3.1 Partisipasi Politik Masyarakat Gianyar Utara

Gianyar utara yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi kecamatan Payangan, kecamatan Tegallalang, kecamatan Tampaksiring dan kecamatan Ubud. Empat kecamatan ini keberadaannya cukup jauh dengan pusat pemerintahan kabupaten. Partisipasi politik masyarakatnya dalam pemilihan kepala daerah langsung di era reformasi menunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi masyarakat

Gianyar selatan. Kecamatan Tegallalang memperlihatkan partisipasi masyarakatnya tertinggi diantara tiga kecamatan lainnya yang ada di Gianyar utara.

Mujani (2012:220) mengatakan, perbedaan wilayah tinggal pedesaan-perkotaan mungkin berpengaruh terhadap partisipasi politik karena partisipasi sangat mungkin terkait dengan mobilisasi oleh agen-agen atau aktor-aktor politik. Tokoh-tokoh adat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan relasi kekuasaan yang dimiliki mensosialisasikan pemilihan kepala daerah kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon sebagai bentuk dukungannya, mengundang pasangan calon kepala daerah datang *mesimakrama* ke desanya untuk pengenalan lebih dekat kepada warga dengan menyampaikan program-programnya. *Simakrama* sebagai bentuk sosialisasi politik untuk menyampaikan program-program kepada masyarakat. Surbakti (2010:149) mengatakan, melalui sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Tokoh-tokoh adat sebagai kelompok yang minoritas di desa dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Kekuasaan tokoh adat yang mempunyai kekuatan mengumpulkan masyarakat adat dapat diminta bantuannya untuk memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon. Kekuatan tokoh adat bertemu dengan pemilih yang masih mudah di pengaruhi oleh sentimen *primordial*, membuat situasi ini mengancam demokratisasi di tingkat lokal dan peranan politis *civil society* menjadi tidak optimal. Desa adat yang mempunyai otonomi yang luas dalam mengelola wilayahnya, di era reformasi ini dengan adanya pemilihan langsung kepala daerah kemandirian desa adat di bidang politik sudah mulai terganggu. Karena para

calon kepala daerah selalu mengisi ruang-ruang kosong di wilayah desa adat dengan janji-janji politiknya. Janji-janji politik para calon kepala daerah bisa masuk ke dalam individu masyarakat adat karena banyaknya kewajiban yang harus ditanggung masyarakat adat dalam melestarikan pelaksanaan kegiatan adatnya seperti perbaikan *pura* dan sarana umum lainnya, serta biaya dalam melaksanakan kegiatan upacara adat. Untuk meringankan beban tersebut perlu ada bantuan dari pemerintah melalui program bantuan sosial, sehingga untuk mendapatkan bantuan sosial harus membuat jaringan pada kekuasaan dengan memberikan dukungan dalam pemilihan langsung kepala daerah.

Kekuatan dan kekuasaan tokoh adat di manfaatkan oleh elit partai untuk berkolaborasi antara tim partai politik dengan tokoh desa adat dalam mengkampanyekan kandidat yang harus diberikan dukungan, menyatunya kekuatan adat dan partai politik merupakan kekuatan yang cukup besar untuk mengajak masyarakat ikut melakukan pemilihan dan dapat mengarahkan pasangan mana yang harus dipilih. Partai politik yang mempunyai struktur organisasi yang lengkap dan mempunyai data kekuatan pendukungnya sampai ke desa-desa di bantu oleh tokoh adat yang secara individu mempunyai *power* (kekuasaan) untuk menggerakkan masyarakat adat yang dipimpinnya. Strategi tokoh partai menyatu dengan tokoh adat bahu membahu membangun komunikasi dengan masyarakat menyusup ke semua ruang yang ada, meyakinkan masyarakat untuk memilih kandidatnya dengan menyampaikan program-program unggulan. Menyatunya kader partai politik yang ditugaskan mengelola daerah binaannya dengan tokoh masyarakat khususnya tokoh adat merupakan kekuatan yang sangat besar pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat untuk ikut datang ke TPS melakukan pemilihan kepala daerah.

3.2 Partisipasi Masyarakat Gianyar Selatan

Gianyar selatan meliputi kecamatan Gianyar yang juga sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Sukawati. Ketiga kecamatan ini di hubungkan oleh jalan provinsi dan berada dekat dengan Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali. Kerukunan beragama cukup baik meskipun berasal dari berbagai agama dan etnis. Tiga kali pemilihan kepala daerah di era reformasi partisipasi politik masyarakat Gianyar Selatan lebih rendah di bandingkan dengan masyarakat Gianyar Utara. Gianyar Selatan yang penduduknya lebih heterogen khususnya di pusat kota kecamatan, karena banyaknya pendatang dari luar kabupaten maupun dari luar Bali yang tinggal sementara atau menetap. Gianyar selatan cenderung sebagai daerah perkotaan. Piliang (2011:228) mengatakan, kota adalah sebuah fenomena politik, yaitu politik kota, disebabkan di dalam kota beroperasi berbagai bentuk relasi kekuasaan, di dalamnya berlangsung berbagai dominasi kelompok atas kelompok lain, di dalam ada perebutan kekuasaan terus menerus di antara kelompok-kelompok sosial. Kota adalah sebuah ruang yang di dalamnya terjadi segmentasi manusia berdasarkan kelompok sosial, politik, profesi, etnisitas dan budaya. Mujani (2011: 66), mengatakan masyarakat kota dalam *komitment* terhadap demokrasi normatif, warga pedesaan maupun perkotaan tidak berbeda, tetapi warga yang tinggal di perkotaan cenderung negatif dalam menilai pelaksanaan demokrasi. Warga perkotaan lebih kritis. Mereka cenderung menuntut praktik kebebasan dan kesetaraan secara lebih baik lagi.

Masyarakat di perkotaan masih sangat bebas menggunakan hak pilihnya, tidak ada penekanan dari pihak manapun, mereka menikmati demokrasi meskipun masih terikat karena kedaerahannya yang sama dengan salah satu calon kepala daerah

khususnya yang dari Puri Gianyar. Menurut Mujani (2011:67), masyarakat perkotaan cenderung menuntut praktik kebebasan dan kesetaraan secara lebih baik lagi. Ini bukan hanya tingkat pendidikan mereka lebih baik dan lebih banyak punya informasi politik lewat media massa, tetapi juga karena sifat dasar masyarakat perkotaan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Kecilnya partisipasi masyarakat di Kota Gianyar berbagai faktor yang menyebabkan karena kesibukan pekerjaan, mereka lebih mementingkan pekerjaannya apalagi mereka bekerja di sektor swasta atau perhotelan yang mempunyai kedisiplinan tinggi dan juga banyaknya penduduk pendatang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Penduduk pendatang yang mempunyai hak pilih di Kota Gianyar terhimpun dalam suatu wadah sehingga dalam kegiatan politik mereka juga menunggu perintah dari pimpinan organisasinya. Surbakti (2010:184) mengatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah karena kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat di percaya dan dapat di pengaruhi atau tidak?

Lingkungan menjadi salah satu variabel penentu bagi masyarakat dalam menentukan pilihan sehingga menjadi pertimbangan penting untuk mengartikan ke mana kecendrungan perilaku politik individu di sebuah daerah. Kabupaten Gianyar terdiri dari 70 desa/kelurahan terdapat 46.458 buah pura, yang menjadi tanggung jawab masyarakatnya di masing-masing desa adat memerlukan biaya yang cukup banyak untuk merawat dan

melaksanakan upacara, kewajiban adat menjadi beban masyarakat. Masyarakat yang berada di perkotaan dengan kewajiban adatnya sedikit dan kemampuan ekonomi lebih mapan membuat mereka kurang memperhatikan kegiatan politik.

Kecilnya partisipasi masyarakat perkotaan bertentangan dengan teori klasik partisipasi politik menurut Verba (1995); Conway (1998) yang dikutip Mujani (2011:87), bahwa warga yang aktif dalam kegiatan politik, termasuk *voting*, cenderung berpendidikan lebih tinggi. Masyarakat Gianyar selatan sebagai daerah perkotaan penduduknya cenderung berpendidikan, mempunyai akses yang cukup mencari berita tentang calon kepala daerah dan berita politik lainnya tetapi partisipasi politiknya untuk datang ke TPS lebih rendah dari masyarakat Gianyar Utara. Gejala yang bertentangan ini disebut sebagai gejala "*partisipasi politik ritual*" di mana partisipasi kurang bersandar pada pengetahuan yang cukup, tetapi lebih karena alasan yang bersifat ritual, yakni tindakan yang tidak bertujuan lain di luar tindakan itu sendiri. Menurut Verba, Schlozman, dan Brandy yang dikutip Mujani (2011:81), partisipasi politik adalah tindakan sukarela, yang berarti bahwa para pelakunya tidak dipaksa untuk melakukannya. Bahkan menurut Kaasa dan Marsh yang dikutip Mujani (2011:76), demokrasi tidak dapat di bayangkan tanpa kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses bernegara.

Selain memberikan suara langsung ke TPS, bentuk-bentuk partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar adalah sebagai tim sukses/tim pemenangan, sebagai relawan, ikut dalam kampanye, serta memberikan dana kepada pasangan calon.

3.3 Partisipasi Masyarakat sebagai Tim Sukses/Tim Pemenangan.

Dalam kontestasi politik kemenangan dan kekalahan kandidat ditentukan oleh

suatu tim pemenangan, karena kandidat tidak mampu mengatasi semua urusannya sendirian. Tiga kali pemilihan kepala daerah Kabupaten Gianyar di era reformasi terjadi pertarungan dua pasangan calon kepala daerah, yang membuat tensi politik dari awal perekrutan pasangan calon sampai penetapan pasangan terpilih oleh KPUD Gianyar menjadi perhatian masyarakat, selain terjadi pertarungan klasik antara kekuatan Puri Ubud dan Puri Gianyar juga menjadi pertarungan antara PDIP dengan partai Golkar.

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemilihan kepala daerah secara langsung yang demokratis dan profesional di perlukan adanya tim sukses atau tim pemenangan oleh pasangan calon. Tim pemenangan sangat membantu pasangan calon menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat strategis yang membutuhkan konsentrasi penuh. Tim pemenangan pemilihan kepala daerah adalah untuk memperjuangkan kemenangan bagi pasangan calon kepala daerah. Menurut Pahmi (2010:38) tim sukses, atau kelompok-kelompok pendukung sangat menentukan popularitas seorang figur, namun tim sukses yang akan menaikkan popularitas tersebut adalah tim sukses yang bekerja secara ikhlas, bermoral baik, pandai berkomunikasi, pandai membaca kebutuhan-kebutuhan dan kecenderungan pilihan-pilihan masyarakat, memiliki semangat (etos) kerja yang tinggi serta tidak kaku dan arogan dalam melakukan negosiasi-negosiasi politik baik dengan masyarakat maupun lawan politik.

Tim pemenangan calon kepala daerah biasanya dibentuk oleh partai pengusung pasangan calon. Tim pemenangan merupakan jaringan politik partai yang bersifat hirarki dari atas sampai ke bawah, yang semuanya mempunyai tanggung jawab pada wilayahnya untuk kemenangan kandidatnya. Sedangkan jaringan horizontal adalah jaringan kelompok elit yang berusaha menjalin

hubungan dengan kelompok elit lainnya juga untuk kepentingan kemenangan kandidatnya juga.

3.4 Partisipasi Masyarakat sebagai Relawan

Pemilihan kepala daerah di era reformasi memungkinkan lahirnya relawan politik untuk mendukung tim pemenangan, karena tidak semua pemilih mau dekat dengan partai politik. Oleh karena itu, dibutuhkan tangan lain mendekati mereka sehingga partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS melakukan pilihan semakin meningkat. Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 Kabupaten Gianyar, partisipasi masyarakat untuk menjadi relawan politik antara lain terbentuknya relawan Pejengku AMAN.

Pemilihan kepala daerah tidak semata-mata kontestasi antar partai politik untuk merebut kekuasaan tetapi juga terjadi saling mendukung antar pribadi maupun kelompok orang. Terbentuknya relawan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah karena kedekatan kandidat dengan masyarakat. Modal sosial yang dimiliki kandidat telah menembus sekat karena perbedaan partai politik. Menurut Bourdieu yang dikutip Lubis (2014:124), modal sosial adalah martabat dan kehormatan yang bisa menjadi sesuatu yang mendasar untuk menarik klien pada posisi sosial penting dan bisa menjadi alat tukar misalnya dalam karier politik.



Gambar 1. Deklarasi Relawan Pejengku Aman
Dokumen: Bali Tribune 20 April 2016

Berbagai isu di pergunakan untuk menarik perhatian masyarakat oleh relawan sehingga masyarakat mau datang ke TPS untuk melakukan pilihan. Membicarakan perempuan dalam ruang politik memang sangat menarik, karena keterlibatan perempuan dalam politik praktis masih kecil.

Pembentukan relawan di masing-masing TPS oleh partai pendukung dan relawan calon kepala daerah sangat membantu meningkatkan jumlah pemilih untuk datang ke TPS. Sebelumnya relawan telah mendata pendukungnya yang tidak bisa datang ke TPS, mereka bekerja sama dengan saksi yang mencatat satu persatu pemilih yang telah datang. Saksi yang berada di TPS harus cermat mencatat pemilih yang datang dan yang belum datang. Saksi melaporkan kepada koordinator relawan untuk melakukan penjemputan pada pendukungnya. Dengan adanya relawan dari kedua kandidat yang menampung tokoh-tokoh masyarakat di luar struktur partai pendukung, kandidat dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk datang ke TPS melakukan pemilihan.

Relawan politik dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Gianyar yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Karena yang terlibat adalah tokoh-tokoh masyarakat berbau dengan anak-anak muda yang tidak terlibat di dalam partai politik tetapi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Pergerakan relawan tidak mengharapakan materi bahkan mereka melakukan pergerakan dengan biaya sendiri.

3.5 Partisipasi Masyarakat Turun Kampanye

Aktivitas kampanye menurut Mujani (2011:93) adalah satu bentuk partisipasi politik lain meskipun terkait dengan memilih. Menurut Verba, Schiozman, Brady

yang dikutip Mujani (2011:93), seseorang yang berpartisipasi dalam kampanye, atau jenis apa pun dari aktivitas kampanye, kemungkinan besar memiliki kemauan lebih kuat untuk memenuhi kandidat atau partai dan warga negara yang lain mengenai preferensi politik mereka.

Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi misi dan program sehingga masyarakat aktif menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Pahmi (2010:32) menyebutkan, berbagai metode dilakukan mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, melalui media cetak maupun melalui media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum sampai kepada kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Kampanye pemilihan kepala daerah langsung sangat berbeda dengan kampanye masa sebelumnya. Pasangan calon kepala daerah bersama tim pemenangan berusaha mengeksploitasi semua modal yang dimiliki baik modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial untuk memaksimalkan dukungan pemilih. Bourdieu yang dikutip Lubis (2014:124), mereka yang memiliki modal budaya dan modal finansial cenderung memiliki modal sosial yang tinggi. Mereka cenderung melakukan koneksi dan jalinan erat dengan orang lain. Kampanye sebagai salah satu pencitraan kandidat kepada masyarakat harus di kelola dengan sangat baik dan rapi oleh tim pemenangan. Tampilan kampanye yang baik sehingga terjadi kompetisi dan kontestasi yang tinggi antar pasangan calon dalam merebut simpati masyarakat.

Kampanye terbuka juga memberikan kesempatan kepada kandidat untuk menyampaikan visi misinya, memobilisasi kader dan konstituen ke lapangan secara besar-besaran, menghadirkan seniman dan artis-artis untuk menghibur konstituen

dengan harapan mau menunggu sampai pada puncak acara yaitu penyampaian visi misi kandidat. Kampanye sebagai sosialisasi politik pencitraan calon agar lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah membuat semakin pentingnya citra seorang figur di mata konstituennya. Bungin (2018:154), mengatakan citra adalah rupa, gambar, atau gambaran. Citra merupakan gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Adapun citra politik didefinisikan sebagai strategi suatu partai politik, politisi, kepala negara, kepala daerah untuk membangun gambaran positif diri. Pencitraan politik yang dilakukan kandidat mencoba memainkan strategi dengan proses pembentukan citra dalam memperoleh dukungan masyarakat



Gambar 2. KPUD Gianyar Gelar Kampanye Damai
Dokumen; Balipost.com

Sesuai dengan pasal 65 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, kampanye yang di biayai oleh pasangan calon kepala daerah atau partai politik yang mengusungnya adalah kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Sedangkan bentuk kampanye lainnya difasilitasi oleh

KPUD. Selain kampanye berbagai upaya dilakukan oleh pasangan calon dan partai pengusungnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Untuk melaksanakan semuanya itu sangat dibutuhkan biaya yang besar.

3.6 Partisipasi Masyarakat Memberikan Dana/Barang

Dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017, dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp. 750.000.000,00 dan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar Rp.75.000.000,00. Setiap dana kampanye yang diterima berupa uang, wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan serta dilampirkan dalam laporan awal dana kampanye (LADK). Dana itu harus ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan untuk kampanye pemilihan. Menurut Mujani (2011:97), menyumbang uang pada partai atau calon bukan saja membutuhkan modal psikologi politik, tetapi juga membutuhkan uang itu sendiri. Bukan hanya perasaan pentingnya Pemilu dan hasilnya, atau perasaan tertarik pada politik, tetapi juga harus memiliki uang untuk menyumbang berapa pun jumlahnya.

Dana kampanye sebagai salah satu pendukung tim pemenangan di dalam medulang suara dari masyarakat, oleh karena itu kandidat sering mencurahkan banyak waktu dalam mengumpulkan dana sehingga dapat menutupi pembiayaan kampanye. Kampanye membutuhkan dana yang sangat besar mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain. Selain

dana kampanye yang disetorkan pada rekening kandidat oleh donatur, partisipasi masyarakat dalam bentuk yang lain seperti barang mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah pemilih.

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan politik khususnya pemilihan kepala daerah sangat berperan menciptakan pemerintahan yang bersih karena kandidat tidak akan terbebani secara finansial untuk mengembalikan dana jika sudah menjadi kepala daerah. Partisipasi masyarakat dalam pendanaan politik harus dibarengi oleh transparansi berupa keterbukaan dan kemudahan akses agar laporan penggunaan dananya bisa dilihat oleh masyarakat. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat harus dilakukan, untuk apa saja dana tersebut digunakan. Pengawasan penggunaan dana kampanye yang di sumbangkan oleh masyarakat bisa juga mencegah terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat Gianyar Utara sebagai daerah yang bernuasa pedesaan partisipasinya untuk ikut datang ke TPS memilih calon kepala daerah di era reformasi cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat Gianyar Selatan. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon kepala daerah disebabkan adanya kolaborasi antara pengurus/elit partai politik dengan tokoh adat dalam mensosialisasikan calon kepala daerah kepada masyarakat. Bahkan mereka mengatur *simakrama*/pertemuan calon kepala daerah dengan masyarakat sehingga calon kepala daerah dapat menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan apabila mereka terpilih. Sedangkan masyarakat di Gianyar Selatan dengan nuasa perkotaan partisipasinya lebih rendah karena perhatian

mereka terhadap kegiatan politik terhalang oleh kesibukan karena tuntutan pekerjaan yang didukung oleh lingkungan masyarakat yang lebih mandiri. Kehidupan demokrasi masyarakat Gianyar Selatan lebih leluasa dalam melakukan pilihan, tidak ada penekanan-penekanan oleh tokoh adat maupun tokoh masyarakat lainnya.

Sedangkan partisipasi masyarakat sebagai tim pemenangan biasanya diambil dari struktur partai pendukung calon kepala daerah. Tim pemenangan dibuat secara hierarkis dari pusat sampai ke daerah. Bagi masyarakat yang kurang menyenangi atau aktif dalam politik, mereka masuk sebagai relawan pemenangan calon kepala daerah. Menjadi anggota relawan pemenangan juga karena kedekatan dengan calon kepala daerah. Kampanye pemilihan calon kepala daerah dewasa ini sedikit berbeda dengan masa sebelumnya. Kampanye di lapangan terbuka lebih bersifat parade budaya mengeksploitasi semua modal calon kepala daerah dan kampanye-kampanye berupa dialog sebagai penajaman citra calon kepala daerah. Semua kegiatan pemenangan calon kepala daerah membutuhkan dana yang sangat besar. Masyarakat yang berpartisipasi dalam menyumbangkan dananya adalah dari keluarga calon kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mariam. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2018. *Komunikasi Politik Pencitraan The Social Coontrucyion of PublicAdministration (SCoPA)*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mujani, Saiful. Liddle, R. William. Ambardi, Kuskrido. 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta Selatan: Mizan Publika
- Pahmi, SY. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press)
- Piliang, Yasraf Amir. 2011. *Post Realitas. Realitas Kebudayaan dalam Era Post-metafisika*. Yogyakarta: Jalasutra
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sztompka, Piotr. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republic Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Media

Bali Tribune 20 April 2016
Balipost.com